



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. JUMRAN H.
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 143381

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 318.000.000

1. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1275 m2/330 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 15000 m2/108 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
5. Tanah Seluas 1472 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 844.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.565.629

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.168.065.629

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.168.065.629

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHBUDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 453396

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 57800 m2/11200 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	200.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INOVA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	560.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.338.495
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.215.338.495
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.215.338.495

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALMIYATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
3. NHK : 801481

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 774.650.000

1. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/192 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 478.400.000
3. Tanah Seluas 1295 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 194.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BN1 AT SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 184.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.622.252

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.078.272.252

III. HUTANG Rp. 194.840.812

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 883.431.440

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.